



Analisis Akuntabilitas Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Badan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi)

Anisa Rimawati*

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Sulaeman

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

*Corresponding Author: Anisarimawatiagustiani29@gmail.com

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

Abstract. *This study aims to find out how the accountability of budget planning at the Regional Development Planning, Research and Development Agency (BAPPELITBANGDA) of Sukabumi Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection tools used are observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study are that the Office of the Development Planning, Research and Regional Development Agency (Bappelitbangda) of Sukabumi Regency is accountable or responsible for budget planning. It can be seen that Bappelitbangda*

Keyword: *Accountability, Planning and Realization*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan anggaran belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi sudah akuntabel atau bertanggungjawab dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat bahwa Bappelitbangda sudah patuh terhadap kepatuhan hukum, perencanaannya berjalan dengan baik dan laporan realisasi anggarannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Perencanaan, dan Realisasi

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anggaran sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari apa yang di perlukan di lapangan, karena anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui atau disepakati. Dimana pada saat anggaran diusulkan tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan di lapangan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Secara umum atau biasanya alat yang digunakan sebagai perencanaan untuk mengetahui target yang akan di capai oleh pemerintah untuk pelaporan semua kegiatan keuangannya adalah anggaran, laporan itu berguna untuk mengetahui jumlah perwujudan mengenai anggaran APBN yang sebelumnya sudah dialokasikan.

Anggaran pemerintah yang terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan dalam satuan keuangan yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik adalah alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran juga sebagai alat perencanaan mengindikasikan suatu sasaran/target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan.

Pemendagri No. 56 tahun 2007 menjelaskan bahwasanya didalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, keuangan daerah adalah hak dan kewajiban setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, baik yang terkait dengan yang serupa dengan kekayaan atau berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu bagian yang fundamental pada suatu instansi, dimana hal ini berguna dalam pemberian informasi keadaan keuangan sebuah instansi pada saat-saat tertentu.

Menurut Adisasmitas (2011:89) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan. Nur (2019:3)

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi merupakan badan yang bertugas membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintah pada lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan. Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi mempunyai beberapa tugas yaitu mengatur dan menyusun rencana kegiatan atau program pemerintah daerah seperti kegiatan pembangunan daerah

Anggaran Belanja Daerah tergambar dalam keseluruhan hak dalam kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang mampu dinilai terhitungnya dalam segala bentuk kekayaan yang telah terjalin bersama hak dan kewajiban area berikut dalam periode

pertahun. Anggaran Belanja Daerah menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mengukur seberapa besar tercapainya akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat lewat penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dalam perwujudan *Good Governance* dan *Akuntabilitas* dalam Lingkup Pemerintah dapat dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

**Laporan Target Belanja dan Realisasinya Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018-2021**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase(%)
2020	15.552.508.832	15.188.533.476	97,66%
2021	14.570.351.042	14.363.475.218	98,58%

Sumber: Bappelitbenda Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan fenomena di atas terjadinya akuntabilitas perencanaan realisasi anggaran pada tahun 2018-2021 yang belum memenuhi target dan belum sesuai dan akuntabilitas perencanaan yang terdapat pada realisasi anggaran belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami fluktuasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik adalah keajiban pemerintah untuk bertanggungjawab menyajikan, melaporan, memberikan informasi mengenai segala aktivitas, pihak pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Cindy Azmi Utami (2019:24)

Menurut mardiasmo (2018:32) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

- a. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

- b. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nur (2019:16)

Akuntabilitas ini mempunyai beberapa dimensi seperti yang dijelaskan oleh Hopwood & Tomkis (2019:14)

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probility*)
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Menurut Munandar (2014:1) Anggaran yaitu: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”. D Pakan (2021:9)

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Munandar (2014:10), fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu:

- a. Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target -target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

- b. Sebagai alat koordinasi kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi kerja agar semua bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, aling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan.

c. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh kerja realisasi anggaran perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.

Mulyadi (2013:490), mengatakan bahwa karakteristik anggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
- d. Usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali setuju, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Nafarin (2013:11), menegaskan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
- b. Data waktu lalu.
- c. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
- d. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
- e. Penelitian untuk pengembangan perusahaan

Menurut Nafarin (2013:31), anggaran dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi dasar penyusunan
- b. Dilihat dari segi cara penyusunan
- c. Dilihat dari segi jangkat waktu
- d. Dilihat dari segi bidangnya

Menurut Anggarini (2016) dalam Lily Ibrahim (2020:26) Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan dalam undang-undang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan meliputi;

- a) Pendekatan politik
- b) Pendekatan eknokratik
- c) Pendekatan partisipasif
- d) Pendekatan top-down
- e) Pendekatan bottom-up

Menurut Bhisma (2013) dalam Lilly Ibrahim (2020) alam membahas aspek perencanaan, ada 3 apek yang harus diperhatikan. Ketiga apek yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaan perencanaan (outcome planning), perangkat organisasi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perencanaan, serta proses atau langkah-langkah melakukan pekerjaan perencanaan. Adapun uraian aspek ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil dari pekerjaan perencanaan

Hasil dari pekerjaan perencanaan disebut dengan nama rencana yang dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencaaan lainnya.

b. Perangkat perencanaan

Adalah merupakan satuan organisasi yang ditugaskan dan bertanggungjawab menyelenggaran pekerjaan perencanaan.

c. Proses perencanaan

Adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan.

Menurut Olsen dan Eadie dalam Elyang (2019), jika ditinjau dari ruang lingkup yang rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis
- b. Perencanaan taktis
- c. Perencanaan menyeluruh
- d. Perencanaan terpadu

Menurut Sofyan (2015:62) dalam kutipan Elyang (2019:20) rencana dibagi beberapa jenis:

- a. Rencana umum (*strategic plan*)
- b. *Tactical planning*
- c. *Operational planning*

Menurut Pemendagri 86 Tahun 2017 ada beberapa tahapan dalam perencanaan di antara lainnya sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) Laporan Realisasi Anggaran merupakan “ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan secara garis besar, Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

- a. Dari atas kebawah (*Top-down*)

Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikannya tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

- 1) perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
- 2) Metode pembagian semena-mena (*Arbitrary allocation method*) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.
- 3) perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
- 4) Metode pembagian semena-mena (*Arbitrary allocation method*) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya Metode ini tidak

berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

- 5) Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

b. Dari bawah ke atas (Bottom-up)

Merupakan proses Penyusunan Anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

- 1) Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
- 2) Metode pengembalian berkala (Payout planning) Menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan, pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (breakeven point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
- 3) Metode penghitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam computer dengan teknis analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas. Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain:

a. Pendapatan

- Pendapatan (basis kas)
- Pendapatan (basis akrual)

b. Belanja

- Belanja (basis kas)
- Belanja (basis akrual)

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. *Surplus* atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) dalam kutipan Elyang (2019:29) yaitu:

a. Tujuan

Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi Realisasi dan Anggaran Entitas Pelaporan.

b. Manfaat

Informasi ini berguna bagi para pengguna laporan dalam memperbaiki maupun mengetahui informasi Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber-sumber daya ekonomi, Akuntabilitas dan ketaatan Entitas Laporan terhadap Anggaran dengan;

- 1). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2). Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif menurut Sugiyono (2018:9) dalam kutipan (Aprianti, 2019) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi yaitu dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang diperoleh seringkali bersifat kualitatif. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif dapat menjadi temuan dan pertanyaan potensial. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah masuk.

ANALIA DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2.1 Laporan Target Belanja dan Realisasinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisai	(%)
2020	Belanja	15,552,508,832	15,188,533,476	97,66%
	Belanja Operasi	15,260,333,832	14,898,106,976	97.63%
	Belanja Pegawai	7,345,660,391	7,316,327,069	99.60%
	Belanja Barang	7,914,673,441	7,581,779,907	95.79%
	Belanja Peralatan dan Mesin	292,175,000	290,426,500	99.40%
	Belanja Aset Lainnya	-	-	0.00%
2019	Belanja	14,570,351,042	14,363,475,216	98.58%
	Belanja Operasi	14,055,114,802	13,885,734,718	98.58%
	Belanja Pegawai	6,938,413,070	6,903,162,219	99.49%
	Belanja Barang	7,116,701,732	6,952,572,499	97.69%
	Belanja Modal	515,236,240	507,740,500	98.55%
	Belanja Peralatan dan Mesin	379,056,240	375,251,500	99.00%

Berdasarkan hasil wawancara pada badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) kabupaten sukabumi, kenapa targetanggaran bisa mengalami naik turun karena tergantung dari anggaran daerah, pertama anggaran pendapatan daerah tidak sama setiap tahunnya dan yang kedua tergantung dari target kinerja. Dan hasil persentase itu tergantung dari target dan realisasi, dan persentase itu tidak mungkin 100%. Karena ada yang pensiun jika ada yang pensiun tidak mungkin dikeluarkan lagi gajinya.

Masyarakat sudah semakin sadar akan ada hak-hak politiknya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat dan didorong pula dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi yang diperlukan dalam era keterbukaan ini. Sementara itu Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur terhadap apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dan dalam perencanaan anggaran harus ada pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai: Bappelitbangda sudah menjalankan akuntabilitas perencanaan dengan baik secara optimal dan maksimal, karena dalam menjalankan tugas-tugas Bappelitbangda sangat mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas peraturan perundangan dari kemendagri 86 tahun 2017 dan prosesnya sudah menggunakan sistem keuangan dalam bentuk sistem informasi dalam pemerinta daerah. Dan untuk faktor yang menghambat adalah dari kebutuhan yang terlalu besar sedangkan sumber daya anggarannya terbatas dan untuk kinerja angaran bappelitbangda cukup bagus dan hampir meningkat setiap tahunnya. Untuk target anggaran belanja tergantung dari anggaran daerah karena pendapatan daerah tidak sama setiap tahunnya.

Adanya rasa tanggungjawab yang efektif dari kepala daerah dan para staf untuk meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri, yaitu dalam memberikan pertanggungjawaban yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Analisis Akuntabilitas Perencanaan dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Bappelitbangda Kab. Sukabumi maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

a. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi terkhususnya tentang akuntabilitas perencanaan anggaran belanja daerah.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat diharapkan mampu sebagai tambahan dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan analisis akuntabilitas perencanaan dalam anggaran belanja daerah.

2. Institusi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, dan meningkatkan atau saran bagi Pemerintah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2020). *28006-57549-1-Pb. 15(2)*, 131–138.
- Ibrahim, L., Abdi, M. N., & Elyang, E. (2020). Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(1), 23–49. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i1.3046>
- Dedi Candira, K. H. (2019). Analisis Perencanaan Penganggaran Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 3(2), 11–20. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jgoap/article/view/12773>
- Hidayat, M. T. (2022). Analisis penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan keuangan dan pajak Daerah Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 27(1), 52–62. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no1.a5518>
- Siti_Khoerunisa; Adang Djatnika Effendi; Yulia Rahmah Fithriany; (2022). *Analisis Rencana Anggaran Biaya Proyek Dan Realisasi Anggaran Proyek Terhadap Profitabilitas Pt. Bima Sakti Geotama Bandung*. 3(1), 57–65.
- Maghfirah, N., & Nasution, J. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Bagian REN BNN Sumatera Utara. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(2), 25–28. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i2.178>
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Oleh, D., Pakan, D., Memenuhi, U., Satu, S., Gelar, G. M., & Ekonomi, S. (2021). *Analisis perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor bappelitbangda provinsi sulawesi selatan. Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov . Sul - Sel Tahun 2016 – 2017 Skripsi Oleh Elyang*. (2019).